

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah

Kinerja pembangunan Jawa Timur tahun 2013 diukur berdasarkan pada 8 (delapan) indikator kinerja utama yaitu : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Kualitas Air Sungai.

Tabel 2.102
Matrik Penetapan Indikator Utama

No.	Indikator	Target						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,56 - 6,87	6,88 - 7,19	7,20 - 7,49	7,5 - 8,00	8,01 - 8,10	8,11 - 8,20	
2	Indeks Gini	0,363 - 0,360	0,359 - 0,356	0,355 - 0,352	0,351 - 0,348	0,347 - 0,344	0,343 - 0,340	
3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia (% Proporsi Kelompok 40% bawah)	20,41 - 20,75	20,76 - 20,89	20,90 - 20,95	20,96 - 21,01	21,02 - 21,08	21,09 - 21,14	
4	Tingkat Kemiskinan (%)	12,72 - 12,22	12,21 - 11,73	11,72 - 11,22	11,21 - 10,71	10,70 - 10,20	10,19 - 9,69	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,32 - 4,23	4,22 - 4,13	4,12 - 4,03	4,02 - 3,93	3,92 - 3,83	3,82 - 3,73	
6	Indeks Pembangunan Manusia	73,15 - 73,45	73,46 - 73,76	73,77 - 74,07	74,08 - 74,38	74,39 - 74,69	74,70 - 75,00	
7	Indeks Pembangunan Gender	67,18 - 67,78	67,79 - 68,39	68,40 - 69,00	69,01 - 69,61	69,62 - 70,22	70,23 - 70,83	
8	Kualitas Air Sungai	a. BOD (mg/l)	3,59 - 3,57	3,58 - 3,56	3,57 - 3,55	3,56 - 3,54	3,55 - 3,53	3,54 - 3,52
		b. COD (mg/l)	10,91 - 10,86	10,87 - 10,83	10,84 - 10,80	10,81 - 10,77	10,78 - 10,74	10,75 - 10,71

Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

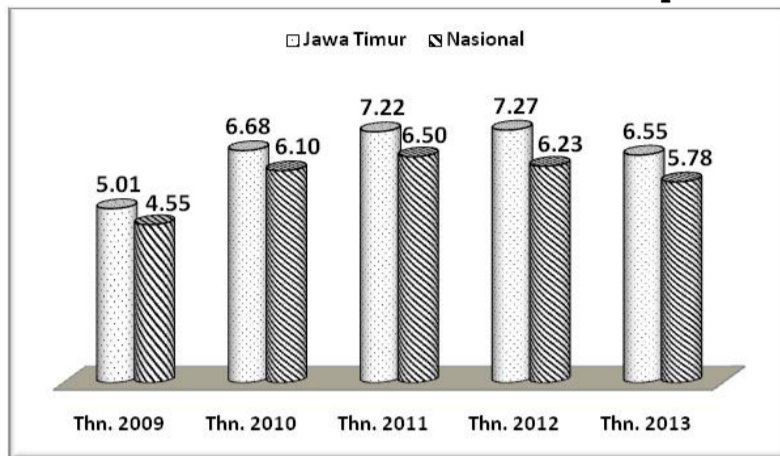
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)

Pada tahun 2009 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen, kemudian tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing tumbuh sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, namun pada tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB sektoral pada tahun 2013 hampir seluruh sektor mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor pertambangan dan pengalihan; sektor konstruksi;

sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Hal ini disebabkan oleh situasi perekonomian global yang masih mengalami krisis, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektoral Jawa Timur.

Gambar 2.47
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Terhadap Nasional



Sumber : BPS Prov Jatim

Selanjutnya perekonomian Jawa Timur yang diukur dengan besaran PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2009 sebesar Rp. 684,234 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 1.136,330 triliun pada tahun 2013. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2009 meningkat dari Rp. 320,861 triliun menjadi Rp. 419,430 triliun tahun 2013.

2. Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Indeks gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Indeks gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Selama kurun waktu tahun 2009-2011 nilai indeks gini di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan kearah peningkatan, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0.01 dibandingkan tahun 2011. Sedangkan tahun 2012-2013 tidak mengalami perubahan yaitu 0,36. Kondisi tersebut, masih lebih baik bila dibandingkan nilai indeks gini Nasional dan termasuk dalam kategori ketimpangan sedang (antara 0,3 – 0,5).

Tabel 2.103
Nilai indeks Gini menurut Status Wilayah di Jawa Timur
Tahun 2009-2013

Tahun	Status Wilayah	Indeks Gini Jawa Timur	Indeks Gini Nasional
2009	Kota	0.34	0,37
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.33	
2010	Kota	0.36	0,38
	Desa	0.26	
	Kota+Desa	0.34	
2011	Kota	0.38	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.37	
2012*)	Kota	0.37	0,41
	Desa	0.30	
	Kota+Desa	0.36	
2013**)	Kota	0.39	0,41
	Desa	0.29	
	Kota+Desa	0.36	

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

Keterangan : *) Angka Diperbaiki

**) Angka Sementara

G < 0,3 = Ketimpangan Rendah

0,3 ≤ G ≤ 0,5 = Ketimpangan Sedang

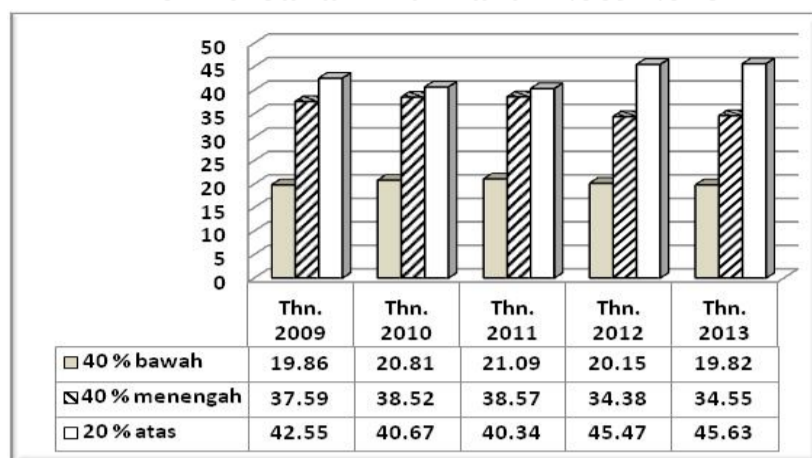
G > 0,5 = Ketimpangan Tinggi

3. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. Kelompok I : 40% penduduk berpendapatan rendah; Kelompok II : 40% penduduk berpendapatan menengah, dan Kelompok III : 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Dari pengukuran pemerataan pendapatan berdasarkan versi Bank Dunia, menunjukkan bahwa kelompok yang mempunyai pendapatan berkategori pendapatan 20 persen keatas pada tahun 2009 sebesar 42,55 persen, meningkat menjadi 45,63 persen pada tahun 2013. Untuk kelompok pendapatan 40 persen menengah pada tahun 2009 sebesar 37,59 persen dan menurun pada tahun 2013 menjadi 34,55 persen. Selanjutnya 40 persen terbawah di Jawa Timur pada tahun 2009 sebesar 19,86 persen, kemudian menurun menjadi 19,82 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ketimpangan pendapatan 40 persen terendah yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2013 termasuk dalam kategori rendah.

Gambar 2.48
Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

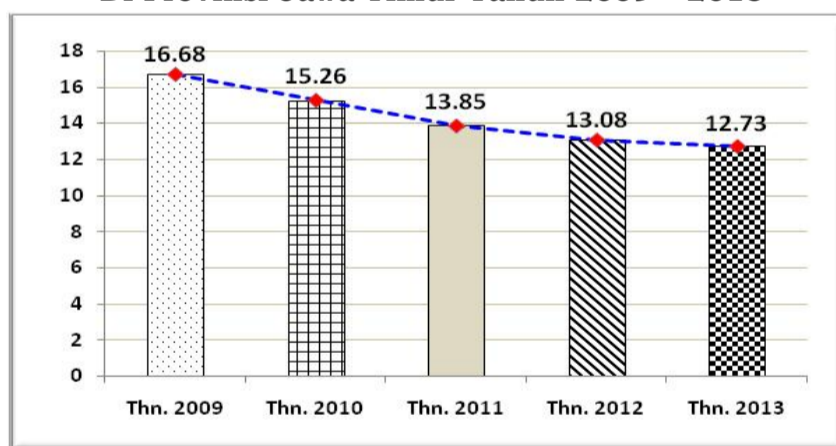


Sumber : BPS Prov Jatim

4. Tingkat Kemiskinan (%)

Pembangunan ditujukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan berbagai upaya penjabaran dan implementasi program pembangunan terjadi distorsi pembangunan salah satunya kemiskinan. Berbagai strategi untuk mengatasi distorsi tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Gambar 2.49
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013



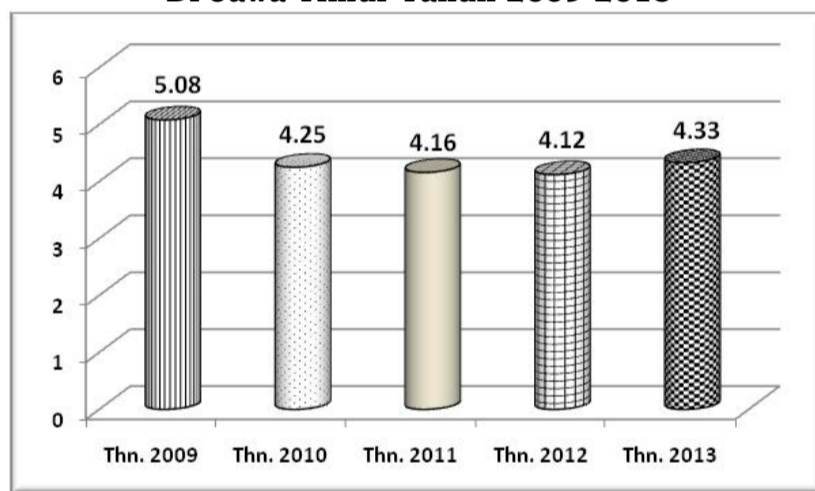
Sumber : BPS Prov Jatim

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama lima tahun terakhir secara gradual (2009 - 2013) menunjukkan trend penurunan. Penurunan angka kemiskinan memberikan pengaruh pula kepada jumlah penduduk di atas garis kemiskinan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan sebesar 16,68 persen atau dengan jumlah penduduk sebesar 6.022,59 ribu jiwa, kemudian mengalami penurunan yang cukup dratis hingga menjadi 12,73 persen atau jumlah penduduk sebesar 4.865,82 jiwa di tahun 2013.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar Internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Gambar 2.50
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Di Jawa Timur Tahun 2009-2013



Sumber : BPS Prov Jatim

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2012 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan Kerja di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai sebanyak 19,901 juta orang atau bertambah sebesar 139,672 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2011 sebesar 19,761 juta orang.

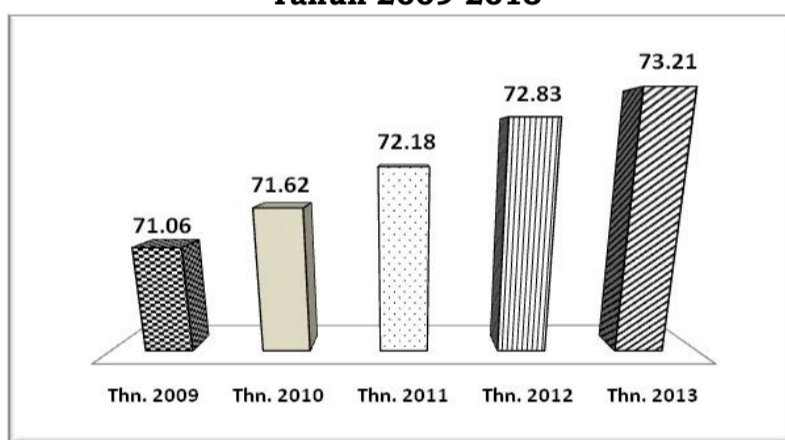
Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,88 persen atau 19,81 juta. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di pasar kerja (TPT) sebesar 4,12 persen atau 819,563 ribu orang pada tahun 2012, relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011 yang mencapai 4,16

persen atau 821,546 ribu orang. Sedangkan kondisi tahun 2013, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,33 atau 871.000 orang persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 20,137 juta orang.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dapat merefleksikan status pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indkes komposit yang mencakup tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu kesehatan (Angka Usia Harapan Hidup), pencapaian tingkat pendidikan (Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Gambar 2.51
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009-2013



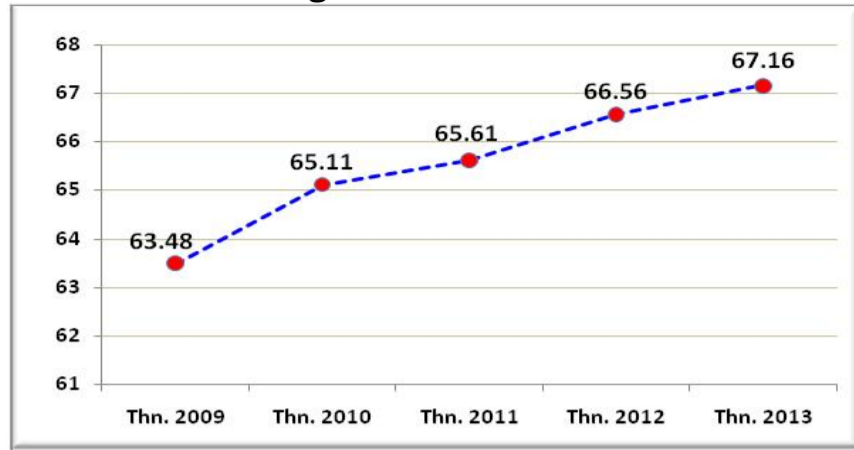
Sumber : BPS Prov Jatim

Secara umum angka IPM di Jawa Timur selama periode 2009-2013 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 nilainya 71,06, dan selanjutnya meningkat terus menjadi 71,62 (2010); 72,18 (2011); 72,83 (2012) dan pada tahun 2013 mencapai 73,21.

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan Ukuran yang dipakai untuk menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan.

Gambar 2.52
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2009-2013



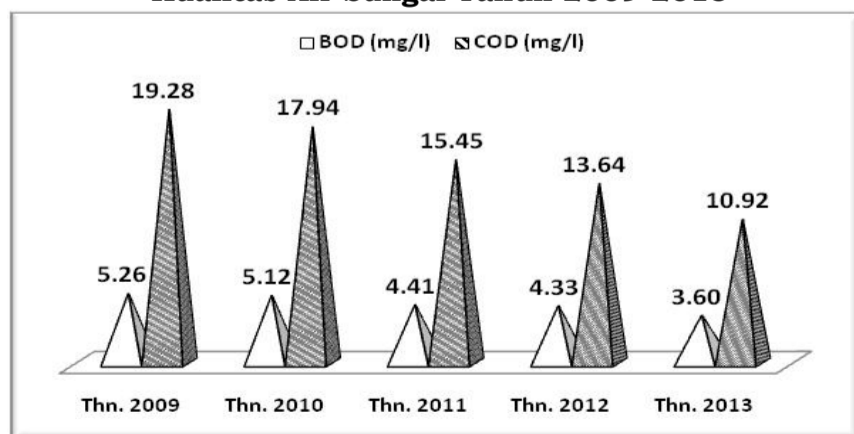
Sumber : BPS Pusat

Indeks pembangunan gender (IPG) dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu tahun 2009-2013, dimana berturut-turut mencapai 63,48 (2009); 65,11 (2010); 65,61 (2011); 66,56 (2012); dan 67,16 (2013).

8. Kualitas Air Sungai

Sesuai perkembangan ekonomi dan pertumbuhan industri di DAS Brantas, pada saat ini potensi industri terdapat ± 1.004 buah dengan jumlah industri potensi pencemar ± 483 buah, dikali Surabaya 65 industri dan DAS Brantas 33 industri. Umumnya sumber pencemar berasal dari limbah domestik sebesar 50%, limbah industri sebesar 40 %, limbah pertanian dan sebagainya sebesar 10%. Terkait hal tersebut kondisi kualitas air belum mencapai baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga perlu adanya penurunan beban pencemar. Selama periode 2009-2013, menunjukkan perbaikan dengan indikator penurunan konsentrasi BOD dari 5.26 mg/l menjadi 3.60 mg/l dan COD dari 19,28 mg/l menjadi 10.92 mg/l.

Gambar 4.53
Kualitas Air Sungai Tahun 2009-2013



Sumber : Badan Lingkungan Hidup Prov Jatim